

HUKUM KEKUASAAN DAN DEMOKRASI MASA YUNANI KUNO

Yudi Widagdo
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRACT

Plato and Aristotle are thinkers on the future of Greece that were raised in the Greek civilization. Aristotle is known as empirical-realist thinkers in contrast to Plato who think utopian and idealistic. Aristotle's thought might be a form of protest against the thoughts and ideas of Plato. Aristotle was a pupil of Plato, while Plato was strongly influenced by Socrates thought either ideas, ideas and values delivered by Socrates, all written by Plato in the form of books, particularly his phenomenal work is up to now. Plato's idea is relative not to have original values for Plato simply continued the ideas presented by Socrates, possibly a writer dare say that Plato was not there but there was only the thought of Socrates, but it's relative. Plato has also developed the idea and values taught by Socrates, because Socrates never wrote his thoughts in a book, this is perhaps the weakness of Socrates.

Keywords : Law, Power, Ancient Greek

ABSTRAK

Plato dan Aristoteles adalah pemikir pada masa Yunani, yang dibesarkan pada peradaban Yunani. Aristoteles dikenal sebagai pemikir empiris-realis berbeda dengan Plato yang berfikir utopis dan idealis. Bisa jadi pemikiran Aristoteles adalah bentuk protes terhadap pemikiran dan gagasan Plato. Aristoteles adalah murid dari Plato, sementara Plato sangat dipengaruhi pemikirannya oleh Socrates, baik gagasan, ide dan nilai-nilai yang disampaikan oleh Socrates, semuanya ditulis oleh Plato dalam bentuk buku, terutama karyanya yang fenomenal sampai sekarang. Pemikiran Plato relatif tidak memiliki nilai-nilai orisinalitasnya dipertanyakan, sebab Plato hanya melanjutkan pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Socrates, bisa jadi penulis berani mengatakan pemikiran Plato tidak ada tapi yang ada hanya pemikiran Socrates, tapi itu relative. Plato juga telah mengembangkan ide dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Socrates, sebab Socrates tidak pernah menulis pemikirannya dalam bentuk buku, disinilah barangkali kelemahan Socrates.

Kata Kunci: Hukum, Kekuasaan, Yunani Kuno

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Keterkaitan antara hukum kekuasaan dan demokrasi pada masa Yunani, bisa dilacak dari cerita cerita turun temurun atau tradisi lisan, serta peninggalan artefak atau bukti lain yang masih bisa dilacak. Meski tidak lengkap, yang jelas persoalan hukum, kekuasaan dan demokrasi, telah dilaksanakan di era, zaman atau masa Pra Socrates.

Hukum, kekuasaan dan politik selalu berhubungan sepanjang masa, sejak zaman pra Sokrates, atau zaman Yunani Kuno, zaman Sokrates, Abad Pertengahan dan abad Modern saat ini. Hukum dan kekuasaan ibarat dua sisi uang logam, di mana ada hukum, disitu ada kekuasaan. Hal yang sama juga berlaku untuk demokrasi.

Demokrasi dan kekuasaan saling terkait erat, sebab cita-cita tertinggi negara hukum adalah berlakunya atau terlaksananya demokrasi. Demokrasi adalah inti setiap negara hukum. Hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan, agar kekuasaan tersebut bisa diakui, sebaliknya hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Penguasa tidak bisa mempergunakan kekuasaannya dengan semena-mena tanpa dasar hukum atau atas nama demokrasi

Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip mengenai kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat prosedur (hukum) dan praktek (kekuasaan) yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku.¹

Salah satu unsur penegak demokrasi adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian, bahwa memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Terminologi politik yang dominan dalam suatu negara hukum adalah pemilu, demokrasi dan kekuasaan. Ada kaitan erat antara hukum

¹United States Information Agency (USIA), *What is Democracy*, 1991, hal. 4

dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan ibarat dua sisi sekeping uang logam, di mana ada hukum, disitu ada kekuasaan. Demikian juga dengan demokrasi. Demokrasi merupakan elemen penting yang menjadi cita-cita setiap negara yang mengatas namakan negara hukum.

Setiap negara harus mempunyai kekuasaan untuk memelihara ketertiban dengan aturan hukum, juga tidak sewenang-wenang mengingat demokrasi adalah sistem dimana rakyatnya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi, partai politik, organisasi dan asosiasi.² Keanekaragaman ini disebut pluralisme dan ini berasumsi, bahwa banyaknya kelompok terorganisasi dan lembaga dalam suatu masyarakat demokratis tidak bergantung pada pemerintah bagi kehidupan, legitimasi atau kekuasaan mereka.

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan selalu dibatasi oleh keputusan-keputusan rakyat, karena keputusan rakyat merupakan salah satu dari komponen-komponen pendukung tegaknya demokrasi.³ Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi akan selalu ditemukan adanya supra stuktur politik (legislature, bestuuren dan yudicial) dan infra stuktur politik (partai politik, alat komunikasi politik, dll) sebagai pendukung tegaknya demokrasi.

Namun terkadang hukum, kekuasaan dan demokrasi tidak berjalan beriringan. Bahkan tidak jarang atas nama kepentingan pribadi dan golongan terjadi tirani hukum, kekuasaan dan demokrasi. Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis tertarik membahas relasi antara hukum, kekuasaan dan demokrasi.

²Askalani, Isro Safril, Muh. Hamzah, Muh Yacob, *Rekam Jejak Demokrasi Aceh*, Bandar Publishing 2012, hal. 10

³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 2000, hal. 140

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pemikiran kenegaraan atau konsep negara dan hukum pada zaman Yunani, Pra Socrates.
- b. Bagaimana konsep negara dan hukum menurut Socrates, Plato dan Aristoteles.

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji secara mendalam tentang pemikiran kenegaraan atau konsep negara dan hukum pada zaman Yunani, Pra Socrates.
- b. Untuk mengkaji secara mendalam tentang konsep negara dan hukum menurut Socrates, Plato dan Aristoteles.

C. PEMBAHASAN

1. Zaman Pra Socrates

Bangsa Yunani adalah orang-orang yang bermigrasi ke Yunani pada dua periode berbeda. Pertama, pada Zaman Perunggu (2000-1050 SM), dan kemudian migrasi orang-orang Yunani Hellen pada masa awal Zaman Besi melalui invasi Doria. Bangsa Yunani pada Zaman Perunggu, yang disebut juga bangsa Yunani pra-Hellen, menempati Yunani sejak awal Zaman Perunggu, dan menggantikan penghuni sebelumnya, yang tidak menuturkan bahasa Yunani. Para penulis Yunani menyebut mereka bangsa Pelasgi. Tidak diketahui bahasa apa yang dituturkan oleh orang-orang Pelasgi tersebut. Namun nama beberapa kota tetap bertahan setelah pengambilalihan oleh orang Yunani, di antaranya adalah Tirins dan Korintus di daratan utama, serta Knossos di pulau Kreta.

Invasi Doria (1200-1050 SM) telah membawa orang-orang Hellen yang berbicara dengan tiga dialek Yunani yang berbeda yaitu dialek Aiolia, Doria, dan Ionia. Orang-orang Yunani Hellen ini merupakan leluhur dari bangsa Yunani modern. Pada masa kini, orang Yunani menyebut diri mereka sebagai Hellenes (orang-orang Hellen).

Dalam mitologi Yunani, orang Hellen adalah keturunan dari Hellen, putra Deukalion dan Pirrha, yang bertahan hidup dari bencana banjir besar.

Bangsa Aiolia, Doria, dan Ionia merupakan keturunan dari putra-putra Hellen, Aiolos dan Doros, serta dari cucu Hellen, Ion. Dalam Iliad, Homeros sering menyebut pasukan Yunani dalam Perang Troya sebagai orang-orang Danaos, Argos, dan Akhaia. Meskipun Akhaia secara geografis dapat merujuk kepada Akhaia di sebelah utara Peloponnesos, dan Akhaia di sebelah selatan Thessali, yang kadang disebut Phthiotis. Baik orang Danaos dan Argos merujuk kepada penduduk Argolid atau kota Argos. Jadi setidaknya dalam mitologi, orang Hellen sudah ada di Yunani pada Zaman Perunggu, yang terbukti tidak benar. Ini hanyalah pembenaran atau propaganda bahwa orang Hellen selalu tinggal di Yunani.

Orang Yunani kuno memiliki banyak bentuk pemerintahan, karena ada banyak negara kota di Yunani kuno, dan masing-masing memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Selain itu, gagasan tentang pemerintahan yang baik juga terus berubah seiring waktu. Aristoteles membagi pemerintahan di Yunani menjadi beberapa bentuk, antara lain monarki, oligarki, tirani, dan demokrasi. Pembagian ini masih sering dipakai oleh sebagian besar sejarawan. Sebagian besar kota di Yunani pada awalnya menerapkan monarki, kemudian berganti oligarki, kemudian tirani, kemudian demokrasi, namun pada tiap periode ada beberapa negara kota yang menggunakan sistem yang berbeda-beda pula, bahkan ada beberapa yang tidak pernah menerapkan tirani atau demokrasi sama sekali.

Pada Zaman Perunggu Akhir, disebut periode Mykenai, antara tahun 2000 SM dan 1200 SM, semua negara kota Yunani tampaknya menerapkan monarki yang dipimpin oleh raja. Naskah Iliad karya Homeros menceritakan banyak raja yang berkuasa di kota-kota Yunani, di antaranya Agamemnon dan Theseus. Beberapa istana raja dari masa ini berhasil ditemukan oleh para arkeolog.

Yunani kuno tidak diragukan lagi merupakan salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Dari daerah yang terletak di ujung semenanjung Balkan ini, tercipta dan berkembang berbagai hal penting, misalnya demokrasi, alfabet, filsafat, teater, dan ilmu pasti.

Yunani kuno berlangsung dari periode Arkhaik, pada abad 8-6 SM, hingga tahun 146 SM ketika Romawi menaklukan Yunani setelah Pertempuran Korinthos. Pusat dari periode ini disebut Yunani Klasik, yang berlangsung dari abad 5-4 SM, dan diawali oleh keberhasilan Yunani, dengan dipimpin oleh kota Athena, dalam memukul mundur serangan dari Persia. Zaman Emas Athena berakhir setelah Sparta mampu mengalahkan Athena dalam Perang Peloponnesos.

Perang Peloponnesos (431-404 SM) antara Sparta dan Athena, beserta sekutu masing-masing, amat sangat melemahkan kekuatan kolektif Yunani, dan pada 336 SM, hampir semua negara-kota di Yunani berada di bawah kekuasaan Makedonia. Itu adalah untuk pertama kalinya Yunani menjadi satu unit politik. Aleksander III yang dikenal sebagai Aleksander Agung, raja Makedonia berikutnya, mewarisi Yunani dari ayahnya, Phillip. Dengan pasukan dari Yunani, Aleksander berhasil menaklukan sebagian besar wilayah yang sudah dikenal oleh orang Yunani. Bersama penaklukkannya, dia juga menyebarkan budaya Yunani (Hellenisme,) ke Mesir, Persia, dan bahkan India. Setelah kematian Aleksander Agung, kekaisarannya terpecah menjadi empat, dan salah satunya adalah Yunani, yang bertahan sampai 168 SM, ketika akhirnya Makedonia ditaklukan oleh Romawi. Keseluruhan Yunani sendiri benar-benar dikuasai oleh Romawi pada 146 SM.

Pada Periode Klasik, budaya Yunani berkembang pesat, dan tersebar ke penjuru Laut Mediterania melalui Kekaisaran Athena, selain juga oleh para pedagang, imigran, dan penakluk dari Yunani. Yunani Klasik sangat berpengaruh terhadap Kekaisaran Romawi, yang pada gilirannya menyebarkan budayanya ke seluruh penjuru Mediterania dan Eropa di bawah

kekuasaan Romawi. Karena alasan inilah, Yunani Klasik dianggap sebagai pondasi bagi peradaban Barat.

Setelah Zaman Kegelapan berakhir, hanya sedikit negara kota Yunani yang masih memiliki raja. Salah satunya adalah Sparta, yang tak hanya mempertahankan jabatan raja, namun juga memiliki dua raja yang berkuasa bersama-sama. Pada masa perang, salah satu raja biasanya tetap tinggal di kota sementara yang satunya pergi berperang. Sebagian besar negara kota pada periode Arkaik menerapkan sistem oligarki, yang mana pemerintahan dipimpin oleh para aristokrat (orang kaya). Kemudian pada tahun 600-an SM dan 500-an SM, banyak negara kota yang dipimpin oleh tiran. Tiran biasanya merupakan seorang aristokrat yang berhasil memperoleh banyak sekali dukungan dari orang miskin.

2. Zaman Socrates

Pada 469 SM, lahirlah Socrates yang kemudian menjadi filusuf terkemuka, yang kritis dan tidak mudah percaya dengan sesuatu apapun tentang kebenaran, akal harus digunakan untuk secara terus menerus meragukan, bertanya dan selalu bertanya dan sampai dan kebajikan itu benar-benar dipahami, bertanya dan kemudian Socrates menjawab pertanyaan tersebut, sehingga orang yang bertanya membuat kehabisan pertanyaan. Karena dianggap sesat dan menyesatkan pemikirannya menyesatkan masyarakat oleh penguasa politik dan konspirasi kaum sofis, Socrates dijatuhi hukuman mati dengan meminum racun 399 SM.

Sesudah peradaban dan kebudayaan Mycena runtuh, kerajaan sebagai simbol kekuasaan dengan megahnya istana. Walaupun tidak ada dua dari ratusan negara kota Yunani yang memiliki sistem organisasi pemerintahan yang sama, namun secara umum memiliki persamaan dalam hal ini memiliki persamaan yaitu memiliki Mahkamah –Mahkamah (dikasteria), senat atau Dewan, yang berhak dihadari oleh semua warga, badan-badan kehakiman atau mahkamah itu sesungguhnya berasal dari kebiasaan pengadilan kepala-kepala suku, sedangkan senat dan sidang umum berasal dari tradisi kolektivimisme.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, meskipun Yunani terdiri dari negara kota yang mandiri yang saling bertempur, namun senantiasa mereka memiliki ikatan yang senantiasa menyatukan, kesadaran ini yang membuat mereka bersatu ketika mereka sedang menghadapi ancaman dari luar, membuat mereka segera bersekutu.

Puncak kejayaan Yunani pada sekitar abad 5 SM, kejayaan Yunani yang mencapai puncaknya kemudian mulai memudar dan akhirnya runtuh sama sekali, hal ini disebabkan peperangan melawan Persia yang terjadi 3 kali, perang peloponesos perang antara Sparta dan Athena, namun Athena telah mampu meninggalkan peradaban yang luar biasa, dan Athena dibalik kehancurannya mampu melahirkan filsafat politik yang mengagumkan dunia seperti Plato, yang lahir dari peradaban ini.

3. Zaman Plato

Plato adalah murid Sokrates yang sangat cerdas. Ajaran Sokrates adalah sangat besar berpengaruh terhadap pemikiran Plato, ia adalah murid setia Sokrates yang banyak mewarisi tradisi keilmuan dan filsafat gurunya, melalui Plato pemikiran-pemikiran Sokrates dilestarikan, Sokrates mempunyai kelemahan karena buah atau hasil dari pemikirannya tidak ditulis dalam bentuk tulisan oleh Plato, adalah kemudian Plato berinisiatif menulis semua pemikiran-pemikiran gurunya, melalui karya Plato yang fenomenal diantaranya; dialog, republic, negara dan apologia.

a. Pemikiran Plato

Nilai-nilai atau pandangan Plato pada dasarnya adalah pandangan tentang kebajikan sebagai dasar negara ideal, ajaran Sokrates kebajikan pengetahuan adalah diterima secara taken for granted, jadi penulis melihat bahwa pemikiran Plato nilai-nilai orisionalitasnya dipertanyakan, penulis berani mengatakan bahwa pemikiran Plato tidak ada, tapi yang ada adalah kelanjutan pemikiran Sokrates saja yang ditulis dan dilanjutkan oleh Plato, artinya Plato hanya melanjutkan pemikiran Sokrates. Hal ini wajar karena plato adalah murid Sokrates. Murid tentu saja

berkewajiban mengembangkan pemikiran awal yang di cetuskan oleh gurunya.

Menurut Plato negara ideal menganut prinsip yang mementingkan kebajikan. Kebajikan menurut Plato adalah pengetahuan. Apapun yang dilakukan atas nama Negara harus dengan tujuan untuk mencapai kebajikan, atas dasar itulah kemudian Plato memandang perlunya kehidupan bernegara. Tidak ada cara lain menurut Plato untuk membangun pengetahuan kecuali dengan lembaga-lembaga pendidikan, inilah yang kemudian memotivasi Plato untuk mendirikan sekolah dan akademi pengetahuan.

Plato menilai negara yang mengabaikan prinsip kebajikan jauh dari negara yang di dambakan oleh manusia, sehingga negara yang ideal menurut Plato adalah negara negara yang menjunjung kebajikan. Plato menggambarkan seorang filsuf adalah dokter, filsuf meski mengetahui penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat, mampu mendiagnosa dan mendeteksi sejak dini. Plato beranggapan munculnya negara adalah akibat hubungan timbal balik dan rasa saling membutuhkan antar sesama manusia.

Plato beranggapan munculnya negara karena adanya hubungan timbal balik dan rasa saling membutuhkan antara sesama manusia, manusia juga dianugerahi bakat dan kemampuan yang tidak sama, pembagian kerja-kerja sosial muncul akibat adanya perbedaan alami, masing-masing memiliki bakat alamiah yang berbeda, perbedaan bakat dan kemampuan justru baik bagi kehidupan masyarakat, karena menciptakan saling ketergantungan, setiap manusia tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara subsistensi, yang untuk memenuhi kebutuhan tersebut membutuhkan orang lain, negara dalam hal ini berkewajiban memperhatikan pertukaran timbal balik, dan berusaha agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Negara ideal menurut Plato juga didasarkan pada prinsip-prinsip larangan atas kepemilikan pribadi, baik dalam bentuk uang atau harta, keluarga, anak dan istri inilah yang disebut nihilism. Dengan adanya hak atas kepemilikan menurut filsuf ini akan tercipta kecemburuan dan kesenjangan sosial yang menyebabkan semua orang untuk menumpuk kekayaannya , yang mengakibatkan kompetisi yang tidak sehat. Anak yang baru lahir tidak boleh dikasuh oleh ibu yang melahirkan tapi itu dipelihara oleh Negara, sehingga seorang anak tidak tahu ibu dan bapaknya, diharapkan akan menjadi manusia yang unggul, yang tidak terikat oleh ikatan keluarga dan hanya memiliki loyalitas mati terhadap negara.

Plato juga tidak memperkenankan lembaga perkawinan, tak seorang pun yang dapat mengklaim istri mereka, istri hanya bisa menjadi hak kolektif, hubungan seks yang dilakukan tidak boleh monogam melainkan poligami, Plato melihat lembaga perkawinan membuat ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan, yang lembaga perkawinan telah mengekang bakat alami manusia dan membuat diskriminasi. Pemikiran Plato yang anti individualism yang telah merusak kehidupan sosial masyarakat Athena, manusia menjadi individualism hanya mementingkan kebutuhan diri mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Padahal kehidupan bernegara menekankan pentingnya saling ketergantungan sesama warga negara.

Ada tuduhan yang mengatakan bahwa Plato adalah anti demokrasi, adalah argumentasi ini membenarkan tuduhan itu. Mengapa Plato menjadi anti demokrasi, pemikiran Plato tidak terlepas dalam konteks sosio-historis kehancuran Athena. Kehancuran Athena menurut Plato bukan hanya karena kekalahan Athena dalam perang peloponesos. Kemenangan

Sparta atas Athena menunjukkan prinsip-prinsip dari kenegaraan bersifat Aristokrat militeristik yang ternyata lebih unggul dibandingkan dengan struktur kenegaraan Athena yang demokratis. Inilah yang melahirkan karya-karya Plato dalam judul republik. Dalam buku ini Plato secara tegas menunjukkan simpati dan kekagumannya kepada sistem kenegaraan otoriter Sparta dan antipatinya kepada demokrasi. Plato menuduh kehancuran Athena disebabkan akibat demokrasi yang lemah dan disintegrasi serta tidak stabil.

Di Negara demokrasi setiap orang berhak dan memiliki kebebasan dalam melakukan apa yang dikehendakinya, tanpa ada kontrol yang ketat dari negara, karena adanya kebebasan setiap orang berhak dalam mengkritik orang lain, terlepas apakah yang di kritik tersebut rakyat atau negara. Bila kekuatan saling mengkritik tanpa adanya control pemerintah, maka akan menimbulkan kekacauan sosial.

b. Etika Plato

Apakah tujuan hidup manusia ? Bagi Plato adalah kehidupan yang senang dan bahagia, manusia harus mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan itu, menurut plato kesenangan itu tidak hanya kepuasan hawa nafsu selama hidup di dunia, Plato sepakat dengan kesenangan dua dunia itu. Dunia ide semua ide dengan ide yang baik atau kebaikan dengan kebajikan sebagai ide yang tertinggi di dunia, ide adalah realitas yang sesungguhnya, sementara segala sesuatu yang ada di indrawi merupakan realitas bayangan . Hanya orang yang baik dan bijaksana yang akan dapat memahami segala sesuatu yang beraneka ragam yang berubah-ubah yang ada di dunia indrawi.

Dengan demikian jelas bahwa etika Plato adalah etika yang berdasarkan dengan ilmu pengetahuan yang benar itu, sementara pengetahuan hanya dapat diperoleh diraih, dimiliki lewat akal

budi, maka itulah kenapa etika Plato disebut dengan etika rasional.

4. Zaman Aristoteles

Aristoteles adalah murid Plato di akademi, dikenal sebagai pemikir empiris-realis berbeda dengan Plato yang berfikir utopis dan idealis. Ada yang berpendapat pemikiran Aristoteles adalah bentuk protes terhadap pemikiran dan gagasan Plato.

Negara menurut Aristoteles diibaratkan dengan tubuh manusia, negara lahir dalam bentuk yang sederhana kemudian berkembang menjadi kuat dan sederhana, setelah itu hancur dan tenggelam dalam sejarah. Negara terbentuk karena manusia yang membutuhkan Negara, manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, hubungan saling ketergantungan antara individu dengan masyarakat.

Negara ideal menurut Plato adalah city state, negara yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil, negara luas akan sulit untuk menjaganya, sementara negara yang terlalu kecil akan sulit untuk dipertahankan karena mudah dikuasai. Menurut Aristoteles, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, bukan berarti lembaga ini tidak memiliki batasan kekuasaan. Tujuan terbentuknya negara adalah untuk kesejahteraan seluruh penduduk atau rakyat bukan kesejahteraan individu. Negara yang baik menurut Plato adalah negara yang dapat mencapai tujuan-tujuan negara. Sementara negara yang tidak dapat melaksanakan tujuan-tujuan tersebut adalah negara gagal.

Aristoteles selalu berpendapat dalam setiap hal termasuk persoalan kekuasaan, demokrasi dan hukum. Pemikiran Aristoteles di tuangkan dalam beberapa buah buku yang hingga saat ini masih bisa di baca. Diantaranya adalah karya yang berjudul.⁴ Politeia, atau Politics. Buku tersebut membahas prinsip-prinsip teoritis bagi tata politik negara ataupun

⁴ www.stoa.org/projects/demos/article_aristotle_democracy diakses pada 8 Agustus 2012, 12.33, dikutip oleh Reza AA Watimena Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala, Surabaya dalam artikel berjudul Demokrasi menurut Aristoteles bagian 1 (satu), di web <http://raymondpronk.files.wordpress.com>

pemerintahan. Di sisi lain, buku tersebut juga banyak berbicara soal situasi aktual masyarakat Yunani Kuno yang memang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Percampuran antara “yang teoritis” dan “yang praktis” terkait dengan ilmu politik amat kental di dalam buku tersebut.

Aristoteles memulai dengan pengandaian dasar tentang apa itu negara, dan siapa itu manusia. Baginya, adanya negara adalah sesuatu yang alamiah, karena manusia, pada hakekatnya, adalah mahluk politis. Dengan kata lain, karena manusia, secara alamiah, adalah mahluk politis, maka negara, sebagai komunitas politis, pun juga adalah sesuatu yang ada secara alamiah. “Dengan demikian,” tulis Aristoteles, “adalah jelas bahwa negara adalah ciptaan dari alam, dan manusia secara alamiah adalah binatang yang politis.”⁵

Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang tak punya negara, atau yang tak tergabung dengan komunitas politis tersebut? Aristoteles secara jelas membedakan antara orang-orang yang tak memiliki negara secara sengaja di satu sisi, dan orang-orang yang terpaksa tidak memiliki negara. Orang-orang yang memilih untuk tak bernegara, bagi Aristoteles, adalah orang-orang yang jahat, yang sekaligus tidak mengenal hukum, pecinta perang dan kekacauan, serta kejam.

Benarkah manusia adalah mahluk politis, dalam arti mahluk yang membentuk polis, atau kota, atau komunitas politis? Benarkah bahwa dia, secara alamiah, terdorong untuk hidup bersama manusia-manusia lainnya dalam satu komunitas? Ini jelas merupakan pengandaian antropologis dari filsafat politik Aristoteles. Dan, menurut saya, ini bukan hanya konsep teoritis, melainkan juga selalu berpijak pada pengalaman nyata manusia-manusia konkret di dunia. Tidak ada satu pun manusia yang hidup tanpa komunitas. Identitasnya sebagai manusia, termasuk kediriannya, pun diberikan oleh komunitas tempat ia hidup dan berkembang. Ada hubungan

⁵ Barnes, Jonathan (ed), *The Complete Works of Aristotle*, Princeton University Press, New Jersey, 1996.

timbang balik antara manusia dan komunitasnya. Di satu sisi, manusia menciptakan komunitasnya. Di sisi lain, ia pun diciptakan oleh komunitasnya. Dalam arti ini, saya sepakat dengan Aristoteles, bahwa dorongan untuk menciptakan tata politik, yakni sebagai manusia manusia politis, adalah kodrat alamiah manusia.

Dengan berpijak pada pengandaian, bahwa manusia adalah makhluk politis, dan bahwa negara adalah sesuatu yang alamiah, Aristoteles menegaskan, bahwa di dalam negara, selalu ada struktur kekuasaan, yakni antara yang memerintah, dan yang diperintah. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah ini memiliki beberapa model. Model pertama adalah model yang primitif, di mana politik ditujukan untuk sepenuhnya kepentingan pemerintah, atau penguasa. Model ini disebutnya sebagai model hubungan tuan dan budak. “Kekuasaan dari seorang tuan,” demikian tulis Aristoteles, “walaupun budak dan tuan secara alamiah memiliki kepentingan yang sama, bagaimanapun juga selalu memihak pada kepentingan tuan.”⁶

Walaupun begitu, tuan tetap harus memikirkan dan mempertimbangkan kepentingan budaknya. Jika budak hancur, maka kepentingan tuan pun tidak akan terpenuhi. Tanpa budak, tidak ada tuan. “Jika budak hancur”, demikian tulisnya, “maka kekuasaan sang tuan pun ikut hancur bersamanya.”⁷

Pada titik ini, Aristoteles memberikan argumen yang amat baik tentang hakekat kekuasaan, yakni, pada hakekatnya, kekuasaan itu bersifat timbal balik. Di satu sisi, publik membutuhkan penguasa, pemerintah, dan pemimpin untuk menjalankan rutinitas hidup sehari-hari, dan menjamin, bahwa semua kebutuhannya, sedapat mungkin, terpenuhi. Di sisi lain, penguasa, pemerintah, ataupun para pemimpin membutuhkan publik untuk melegitimasi kekuasaannya, atau, dalam bahasa filsafat, memberikan

⁶ Pasal 1278b31-1279a22 “The rule of a master, although the slave by nature and the master by nature have in reality the same interests, is nevertheless exercised primarily with a view to the interest of the master.

⁷ “If the slave perish, the rule of the master perishes with him.

“alasan adanya” kekuasaan itu. Poin ini, penting untuk diperhatikan oleh para penguasa politik di seluruh dunia, terutama untuk para tiran yang memerintah dengan tangan besi dan penindasan. Tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan, tanpa publik yang mendukung kekuasaan itu. Maka, tidak ada tiran yang akan terus bertahan, selama ia terus menindas dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Kekuasaan, pada dirinya sendiri, sudah selalu melahirkan kontrol, yakni kepentingan publik itu sendiri. Dari sudut pandang ini, tirani, ataupun bentuk kekuasaan yang menindas lainnya, secara niscaya akan menghancurkan dirinya sendiri.

Model kekuasaan kedua, menurut Aristoteles, adalah model rumah tangga, yakni antara orang tua dan anaknya di dalam sebuah keluarga. Di dalam model ini, kekuasaan digunakan untuk memenuhi kepentingan semua pihak, terutama pihak yang dipimpin. Orang tua memimpin rumah tangga untuk kebaikan anak-anaknya, dan bukan untuk kebaikan orang tuanya semata. Logikanya begini, karena orang tua memperhatikan kepentingan anak-anaknya, maka, secara tidak langsung, kepentingan mereka pun terpenuhi, dan semua pihak akhirnya mendapatkan kepuasan. “Pemerintahan yang terdiri dari istri dan anak dan rumah tangga, yang disebut juga manajemen rumah tangga”, demikian tulis Aristoteles, “ada pertama-tama untuk kebaikan dari pihak yang diperintah atau juga demi kebaikan kedua belah pihak, tetapi secara esensial untuk kebaikan yang diperintah.”⁸

Jika model ini diterapkan di level politik, yakni lebih masyarakat luas, maka yang tercipta kemudian adalah tata politik demokratis. Di dalam politik demokratis, menurut Aristoteles, negara bergerak di dalam kerangka prinsip kesetaraan antara manusia. Penguasa pun tidak lagi digilir berdasarkan darah ataupun kekuatan militer, melainkan dipilih bergantian di antara orang-orang terbaik yang ada di dalam masyarakat tersebut.

⁸ The government of a wife and children and of a household, which we have called household management, is exercised in the first instance for the good of the governed or for the common good of both parties, but essentially for the good of the governed.

Para penguasa dipilih, karena mereka dianggap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas. Dengan menjalankan peranannya, sang penguasa, yang dipilih secara bergantian, pun mendapatkan keuntungan berlimpah. “Seperti situasi alamiahnya,” demikian tulis Aristoteles, “orang akan bergantian melayani sebagai penguasa, dan sekali lagi, orang lain akan memperhatikan kepentingannya, sama seperti dia, ketika ia memimpin, memperhatikan kepentingan mereka.”⁹ Inilah politik yang ideal menurut Aristoteles.

Gagasan ini, merupakan jantung hati dari teori demokrasi. Penguasa memimpin rakyat untuk kebaikan rakyatnya, dan ketika ia menjadi rakyat kembali, dan penguasa lain yang memimpin, ia pun, si mantan penguasa politik, akan diperhatikan kepentingannya. Seluruh praktek demokrasi yang terjadi di dunia sekarang ini sebenarnya berpijak pada prinsip ini. Tentu saja, seperti juga di jaman Aristoteles hidup, banyak penyelewengan yang terjadi di dalam politik demokratis. Misalnya, sang penguasa politis ingin tetap berada sebagai penguasa, bukan karena untuk melayani kepentingan rakyatnya, melainkan untuk memperkaya diri, maupun kelompoknya. Padahal, mereka sebenarnya tahu, bahwa jika memerintah dengan jelek, maka setelah turun dari kursi pemerintahan, mereka akan dibenci.

Demi kebaikan seluruh rakyat, dan kebaikan dirinya sendiri, maka seorang penguasa politis harus memerintah dengan baik dan adil. Ini, pada hemat saya, adalah sesuatu yang amat logis, yang amat penting di dalam seluruh logika demokrasi, yang kini menjadi paradigma politik dominan di seluruh dunia. Belum terciptanya demokrasi di Indonesia bukan berarti, bahwa demokrasi, sebagai konsep dan tujuan politis, cacat. Sebaliknya, proses demokratisasi belumlah kelar di Indonesia, dan tidak ada alasan untuk berhenti sekarang.

⁹ Formerly, as is natural, everyone would take his turn of service; and then again, somebody else would look after his interest, just as he, while in office, had looked after theirs

“Kesimpulannya jelas”, demikian tulis Aristoteles, “pemerintah yang berpihak pada kepentingan bersama dibentuk sesuai dengan prinsip keadilan yang ketat, yakni negara yang merupakan komunitas orang-orang bebas.”¹⁰

Negara yang cacat adalah negara yang hanya mementingkan kepentingan dan keinginan penguasa politis. Bentuknya bisa beragam, mulai dari monarki, sampai dengan totalitarisme militer. Negara demokratis, menurut Aristoteles, persis berkebalikan dengan model semacam itu. Negara demokratis adalah komunitas orang-orang bebas. Penguasanya mengabdikan pada kepentingan rakyat, bukan karena Tuhan memerintahkannya, melainkan karena ia tahu, pola semacam itu juga baik untuk dirinya.

Argumen sentral Aristoteles, yakni demokrasi sebagai komunitas orang-orang bebas,. Dengan kata lain, kebebasan adalah prasyarat demokrasi. Selama orang masih mengikat dirinya sendiri dengan kebodohan-kebodohan mitologis, maka selama itu pula, mentalitas demokratis tidak akan tercipta, walaupun sistemnya sudah di bangun.

Namun, kebebasan apakah yang dimaksud oleh Aristoteles? Apakah bebas sebebaskan-bebasnya, di mana orang bisa melakukan apapun yang ia mau? Menurut tim penulis, berpijak pada konsep manusia menurut Aristoteles, yakni sebagai makhluk rasional, atau hewan yang rasional, kebebasan Aristotelian dapat dilihat sebagai kemampuan manusia untuk mengambil jarak dari dunia sekitarnya, dan membuat penilaian rasional. Dengan penilaian rasional ini, manusia memutuskan, tindakan apa yang akan ia lakukan.

Di dalam berpikir dan membuat keputusan, orang masih diperbudak oleh doktrin-doktrin agama, maupun hasrat dari dalam dirinya untuk mendapatkan uang lebih banyak. Dua hal ini mengaburkan

¹⁰ The conclusion is evident: that governments which have a regard to the common interest are constituted in accordance with strict principles of justice, and are therefore true forms; but those which regard only the interest of the rulers are all defective and perverted forms, for they are despotic, whereas a state is a community of freemen.

kemampuannya untuk mengambil jarak dari dunia. Dua hal ini, menurut saya, juga mengaburkan kemampuannya untuk berpikir rasional. Demokrasi, menurut Aristoteles, adalah komunitas dari orang-orang bebas, yakni orang-orang yang mampu mengambil jarak dari dunia, mempertimbangkan secara rasional keputusannya, dan bertindak.

Aristoteles juga mendefinisikan beberapa bentuk pemerintahan. Baginya, setiap bentuk pemerintahan harus didasarkan pada suatu hukum, atau konstitusi. Penguasa politis, atau pemerintah, adalah otoritas tertinggi dalam suatu negara yang menentukan segalanya. Penguasa politis itu bisa terdiri dari satu orang, beberapa orang, atau semua orang. Pada titik ini, Aristoteles membedakan antara pemerintahan yang sejati, dan pemerintahan yang sesat. Pemerintahan yang sejati menjadi kepentingan bersama sebagai titik pijak semua kebijakannya. Sementara, pemerintahan yang sesat menjadikan kepentingan satu orang, atau golongan tertentu, sebagai titik pijak kebijakannya. Pemerintahan yang sejati, dan pemerintahan yang sesat, bisa dipimpin oleh satu orang, beberapa orang, atau semua orang.

“Pemerintahan yang sejati”, demikian tulis Aristoteles, “dengan demikian, adalah pemerintahan dimana satu, atau beberapa, atau banyak, memerintah dengan pandangan pada kepentingan bersama; tetapi pemerintahan yang melihat hanya pada kepentingan pribadi, baik itu kepentingan satu, beberapa, atau banyak orang, adalah suatu kesesatan.”¹¹

Aristoteles membedakan beberapa bentuk pemerintahan yang sejati, yakni pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat banyak. Pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang, dan mengabdikan pada kepentingan banyak orang, disebut sebagai monarki. Pimpinannya adalah raja. Pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, dan mengabdikan pada kepentingan bersama, adalah aristokrasi. Pimpinannya adalah orang-

¹¹ Pasal 1279a23-1279b3, “The true forms of government, therefore, are those in which the one, or the few, or the many, govern with a view to the common interest; but governments which rule with a view to the private interest, whether of the one, or of the few, or of the many, are perversions

orang terbaik yang ada di masyarakat tersebut. Sementara, pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang, yang mewakili semua orang, disebut juga sebagai pemerintahan konstitusi, atau demokrasi. Di dalam sistem politik semacam ini, satu orang, atau bahkan beberapa orang, dianggap tidak mampu menjamin, bahwa kepentingan bersama bisa terwujud. Maka, mereka perlu mendapatkan bantuan dari orang-orang lainnya.

“Satu orang atau beberapa orang”, demikian tulis Aristoteles, “mungkin memiliki keunggulan di beberapa bidang; namun dengan bertambahnya jumlah maka semakin sulit bagi mereka untuk mencapai kesempurnaan di berbagai bidang keunggulan, walaupun mungkin ini adalah keunggulan militer, yang merupakan kegemaran dari massa.”¹²

Dalam konteks ini, rakyat adalah penguasa tertinggi yang menjamin, bahwa para penguasa politis harus memperhatikan kepentingan bersama. Dari ketiga bentuk sistem politik ini, semuanya bisa terpelintir menjadi pemerintahan yang sesat, yakni pemerintahan yang tidak memperhatikan kepentingan bersama. Pemerintahan monarki dengan mudah dipelintir menjadi tirani, di mana satu orang penguasa memerintah dengan sewenang-wenang, tanpa memperhatikan kepentingan bersama, dan hanya memperhatikan kepentingan sang raja sendiri.

Pemerintahan aristokrasi dengan mudah dipelintir menjadi oligarki, dimana beberapa orang memerintah dengan sewenang-wenang, hanya memperhatikan segelintir orang-orang kaya saja. Sementara, pemerintahan demokrasi bisa dengan mudah tergelincir menjadi pemerintahan anarki, atau pemerintahan oleh orang-orang yang bergantung pada negara, dan tak mampu berdiri sendiri. Saya, dengan berpijak pada argumen Aristoteles, menyebutnya sebagai parasitokrasi, yakni pemerintahan oleh orang-orang

¹² Ibid. “One man or a few may excel in excellence; but as the number increases it becomes more difficult for them to attain perfection in every kind of excellence, though they may in military excellence, for this is found in the masses”.

yang hanya meminta dan menuntut, tetapi tak mau bekerja keras, alias pemerintahan oleh para parasit.¹³

Idealnya menurut Aristoteles monarki sebagai negara ideal, karena ia diperintah oleh seorang filsuf, arif dan bijaksana. Kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi Aristoteles menyadari sistem monarki nyaris tak mungkin ada dalam realitas, ia hanya gagasan yang lahir bersifat normative yang sangat sukar diwujudkan dalam dunia empiris. Oleh karena itu demokrasi menurut Aristoteles dari tiga bentuk negara itu yang bisa diwujudkan dalam kenyataan. Berbeda dengan Plato tidak bersifat realistik ketimbang Aristoteles.

Berbeda dengan Plato mengenai hak milik, Aristoteles membenarkan adanya hak milik individu, hak milik penting untuk memberikan tanggung jawab bagi seseorang untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan sosial.

Karya terbesar filsafat yang dihasilkan oleh Aristoteles adalah logika, sehingga banyak orang mengatakan dia sebagai penemu, atau bapak logika, sebabarnya istilah logika tidak pernah dipergunakan oleh Aristoteles, tapi juga kita mengenal ini dengan dealetika, inti dari logika adalah cara untuk menarik prosisi demi mencari kebenaran, juga sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁴

¹³Ibid. Pasal 1279b11-1279b27, "Of the above-mentioned forms, the perversions are as follows:—of kingship, tyranny; of aristocracy, oligarchy; of constitutional government, democracy. For tyranny is a kind of monarchy which has in view the interest of the monarch only; oligarchy has in view the interest of the wealthy; democracy, of the needy: none of them the common good of al'l.

¹⁴www.pangisyarwi.com/index.php?option=co_content&view=artikel&id=19, tgl.1 Januari 2014

A. PENUTUP

1. Kesimpulan

Negara ideal menurut Plato adalah city state, negara yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil, negara luas akan sulit untuk menjaganya, sementara negara yang terlalu kecil akan sulit untuk dipertahankan karena mudah dikuasai. Menurut Aristoteles, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, bukan berarti lembaga ini tidak memiliki batasan kekuasaan. Tujuan terbentuknya negara adalah untuk kesejahteraan seluruh penduduk atau rakyat bukan kesejahteraan individu. Negara yang baik menurut Plato adalah negara yang dapat mencapai tujuan-tujuan negara. Sementara negara yang tidak dapat melaksanakan tujuan-tujuan tersebut maka adalah negara gagal.

Sementara Negara idealnya menurut Aristoteles monarki, karena ia diperintah oleh seorang filsuf, arif dan bijaksana. Kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi Aristoteles menyadari sistem monarki nyaris tak mungkin ada dalam realitas, ia hanya gagasan yang lahir bersifat normatif yang sangat sukar diwujudkan dalam dunia empiris. Oleh karena itu demokrasi menurut Aristoteles dari tiga bentuk negara itu yang bisa diwujudkan dalam kenyataan. Berbeda dengan Plato tidak bersifat realistik ketimbang Aristoteles .

Berbeda dengan Plato mengenai hak milik, Aristoteles membenarkan adanya hak milik individu, hak milik penting untuk memberikan tanggung jawab bagi seseorang untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan sosial. Sementara mengenai hak milik menurut Plato tidak dibenarkan bahkan dalam hubungan seks istri juga milik bersama, lembaga perkawinan menurut Plato membuat kelas perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Poligami yang lebih disukai oleh Plato dibandingkan dengan monogami. Kepemilikan pribadi menimbulkan hubungan yang tidak sehat, terjadi kompetisi sehingga semua orang berlomba-lomba mengumpulkan harta kekayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Askalani, Isro Safril, Muh. Hamzah, Muh Yacob, *Rekam Jejak Demokrasi Aceh*, Bandar Publishing, 2012
- Barnes, Jonathan (ed), *The Complete Works of Aristotle*, Princeton University Press, New Jersey, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- United States Information Agency (USIA), *What is Democracy*, 1991
- www.pangisyarwi.com/index.php?option=com_content&view=artikel&id=19, tgl.1 Januari 2014
- www.stoa.org/projects/demos/article_aristotle_democracy diakses pada 8 Agustus 2012, 12.33, dikutip oleh Reza AA Watimena Fakultas Filsafat, Unika Widya Mandala, Surabaya dalam artikel berjudul Demokrasi menurut Aristoteles bagian 1, di web <http://raymondpronk.files.wordpress.com>
- http://www.pangisyarwi.com/index.php?option=com_content&view=artikel&id=19:pemikiran-plato-dan-ristoteles&catid=8:makalah&Itemid=103